KANTOR MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI NATAI PELINGKAU

NOMOR BADAN HUKUM : 48/BH/KDK.15.5/VI/2000, TANGGAL 22 JUNI 2000

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

DESA TANGGA BATU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

KABUPATEN LAMANDAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DISAHKAN OLEH : MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR : 28/PAD/DPPK-UKM/15.80/V/2007
- TANGGAL : 09 MEI 2007

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 28/PAD/DPPK-UKM/15.80/V/2007

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI NATAI PALINGKAU
BADAN HUKUM NO. 48/BH/KDK.15.5/VI/2000 TANGGAL 22 JUNI 2000

Membaca : Surat permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari pengurus Koperasi **"NATAI PALINGKAU"** Nomor : 02/KNP - TB/V/2007, Tanggal 05 Mei 2007;

Menimbang : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **"NATAI PALINGKAU"** tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 116 Tahun 1992);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara RI Nomor : 54 Tahun 2000);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1994);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Negara RI Nomor : 8 Tahun 1994);
6. Keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : [illegible] tentang Penyelenggaraan Tugas

Memperhatikan :

1. Surat Asisten Deputi Urusan Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 42/Dep.1.1/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pembuatan Akta Koperasi;
2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah No. 255/500/DK-UKM/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembuatan Akta Koperasi .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **"NATAI PALINGKAU" Badan Hukum No. 48/BH/KDK,15.5/VI/2000 Tanggal 22 Juni 2000** beralamat / bertempat kedudukan di Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

KEDUA : Merubah pasal – pasal sebagaimana pada Anggaran Dasar Koperasi (terlampir).

KETIGA : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 9 M E I 2007

An. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

WAKIL BUPATI LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU

Drs. HGM. AFHANIE

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan PKM di - Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Bupati Lamandau di Nanga Bulik.
4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Provinsi Kalimantan Tengah di – Palangka Raya

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI NATAI PALINGKAU

Yang bertanda tangan dibawah ini : ----------

1. Nama : ROBENSON. K ----------
   Alamat : Desa Tangga Batu ----------
   Jabatan : Ketua ----------

2. Nama : SILPANUS EMBANG ----------
   Alamat : Desa Tangga Batu ----------
   Jabatan : Sekretaris ----------

3. Nama : IROK KESEK RINGKIN ----------
   Alamat : Desa Tangga Batu ----------
   Jabatan : Bendahara ----------

Atas Kuasa Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi " NATAI PALINGKAU " yang diselenggarakan pada Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh, ditunjuk oleh Pendiri selaku Kuasa Pendiri dan sekaligus sebagai Pengurus dan menyatakan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi yang isinya sebagai berikut : ----------

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama Koperasi NATAI PALINGKAU di singkat KNP dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini di sebut KOPERASI. ----------
(2) Koperasi berkedudukan di : ----------
a. Jalan/Kelurahan/Desa : Desa Tangga Batu ----------
b. Kecamatan : Belantikan Raya ----------
c. Kabupaten/kota : Lamandau ----------
d. *Propinsi* : *Kalimantan Tengah* ----------
(3) Koperasi dapat membuka cabang/ perwakilan baik didalam maupun diluar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota. ----------

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. ----------

Pasal 3

(1) Koperasi Melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu . ----- ----------
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, ----------
b. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis, ----------
c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha *masing-masing anggota,* ----------
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, ----------
e. Kemandirian, ----------
f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota, ----------
g. *Kerjasama antar Koperasi*----------
(2) Koperasi ---------- sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas Dasar Prinsip-Prinsip Koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi. ----------

BUPATI

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan Koperasi----------adalah untuk: ----------

(1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya, ----------

(2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan Perekonomian nasional. ----------

Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka KOPERASI menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota,sebagai berikut: ----------
   a. Unit Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Plasma dengan PT. First Lamandau Timber International ----------
   b. Unit Usaha Waserda ----------
   c. Unit Usaha Simpan Pinjam ----------
   d. *Unit Usaha Saprodi* ----------

(2) Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota KOPERASI dapat membuka peluang usaha dengan non anggota, ----------

(3) KOPERASI dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. ----------

(4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), KOPERASI dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. ----------

(5) Koperasi ---------- harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business plan) dan rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota. ----------

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia, ----------
b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha Koperasi, ----------
c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, ----------
d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan simpanan wajib yang besarnya Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Rapat Anggota; ----------
e. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi, ----------
f. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau ----------

BUPATI

Pasal 7

(1) Keanggotaan KOPERASI diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi,Simpanan Pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota KOPERASI. ----------

(2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri ----------

(3) Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun. ----------

(4) KOPERASI secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai **anggota luar biasa**. ----------

(5) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau WNI bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi ----------, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota. ----------

(6) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ----------

Pasal 8

Setiap anggota berhak: ----------

a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi, ----------
b. Manghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota, ----------
c. Memiliki hak suara yang sama, ----------
d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus, ----------
e. Mengajukan pendapat,saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan KOPERASI, ----------
f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha. ----------

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai Kewajiban: ----------

a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan Rapat Anggota ----------
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi ----------
c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi ----------
d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi. ----------

Pasal 10

(1) Bagi mereka yang meskipun telah melunasi pembayaran Simpanan Pokok tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrative, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima dan atau belum membayar seluruh Simpanan Pokok termasuk Simpanan Wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam ART berstatus sebagai **calon anggota** ----------

(2) Calon anggota memiliki hak-hak: ----------

a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi; ----------

UPATI

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; ----------
c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan KOPERASI ----------

(3) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban: ----------
a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota ----------
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KOPERASI, ----------
c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam KOPERASI, ----------
d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam KOPERASI ----------

Pasal 11

(1) Setiap anggota luar biasa memiliki hak: ----------
a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi ----------
b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota ----------
c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi ----------

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban: ----------
a. Membayar simpanan pokok menurut ketentuan didalm AD dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan RA, ----------
b. Berpartisipasi didalam kegiatan usaha KOPERASI ----------
c. Mentaati ketentuan AD, ART, keputusan RA dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam KOPERASI ----------
d. Memelihara dan menjaga nama baik Koperasi ---------- dan kebersamaan dalam Koperasi ----------

Pasal 12

(1) Keanggotaan berakhir,apabila: ----------
a. Anggota tersebut meninggal dunia, ----------
b. KOPERASI membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, ----------
c. Berhenti atas permintaan sendiri;atau ----------
d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam KOPERASI. ----------

(2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota. ----------

(3) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota yang diberhentikan oleh pengurus,dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. ----------

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

(1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOPERASI. ----------

(2) Rapat Anggota KOPERASI ---------- dilaksanakan untuk menetapkan ----------

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan AD/ART, ----------
b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi------
---
c. Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas, ----------
d. Rencana Kerja,Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KOPERASI,serta Pengesahan Laporan Keuangan, ----------
e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila Koperasi ---------- mengangkat pengawas tetap, ----------
f. Pembagian sisa hasil usaha, ----------
g. Penggabungan, peleburan, pembagian,dan pembubaran KOPERASI.----------

(3) Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun. ----------
(4) Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga, ----------
(5) Rapat anggota Koperasi ---------- terdiri dari: ----------
a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) ----------
b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPBN) ----------
c. Rapat Anggota Khusus (RA khusus) ----------
d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) ----------

Pasal 14

(1) Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota KOPERASI dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir,kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, ----------
(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak tercapai,maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7(tujuh) hari,untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kali ----------
(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas quorum tetap belum tercapai,maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. ----------
---
(4) Pengaturan selanjutnya diatur dalam ART. ----------

Pasal 15

(1) Pengambilan Keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. ---
---
(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat,maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. ----------
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara,setiap anggota mempunyai hak satu suara. ----------
---
(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain,yang hadir pada Rapat Anggota tersebut. ----------
(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup,kecuali mengenai diri orang,dilakukan secara tertutup.----------

UPAT

(6) keputusan RA dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. --------
---

(7) Anggota Koperasi----------dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan RA,dengan ketentuan semua anggota Koperasi.harus diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut,tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu. ----------

(8) Pengaturan selanjutnya diatur didalam ART----------

Pasal 16

Tempat,acara,tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya14(empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota-----
---

Pasal 17

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi----------kecuali anggaran dasar menentukan lain----------

(2) Rapat anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi----------dan atau oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang yang dipilih dalam RA tersebut ----------
---

(3) Pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi---------- dari anggota yang hadir,yang tidak menyangkut jabatan Pengurus,Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi ----------

(4) Setiap Rapat Anggota harus di buat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat ----------

(5) Berita acara keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Koperasi dan pihak ke tiga, ----------
---

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (2),tidak diperlukan,jika berita acara rapat tersebut dibuat oleh Notaris----------

Pasal 18

(1) Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku,kecuali ada pengaturan lain dalam AD ----------

(2) RAT membahas dan mengesahkan : ----------
   a. LPJP atas pelaksanaan tugasnya ----------
   b. *Neraca dan perhitungan laba – rugi tahun buku yang berakhir 31 Desember* ----------
   c. Penggunaan dan pembagian SHU----------

(3) RA, RK dan RAPB membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi----------juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, *paling lambat*----------*sebelum tahun buku/anggaran yang* bersangkuatan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.----------
---

UPATI

(4) Apabila RA, RK dan RAPB seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh koperasi----------karena alasan yang objektif dan rasional seperti efesiensi maka : ----------

a. RA, RK dan RAPB dapat dilaksanakan bersamaan dengan RAT dengan acara tersendiri, dengan ketentuan RAT harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku. ----------
b. Selama RK dan RAPB belum disahkan oleh RA dalam pelaksanaan tugasnya pengurus berpedoman pada RK dan RAPB tahun sebelumnya yang telah mendapat acc. ----------
c. *Pengaturan selanjutnya diatur dalam ART dan atau peraturan khusus.* ----------

Pasal 19

Rapat Anggota khusus diadakan untuk :

(1) Mengubah AD dan ART koperasi----------,dengan ketentuan:--
---

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota ----------
b. *Keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah* anggota

(2) Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi----------
dengan ketentuan: ----------

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota ----------
b. Keputusannya harus disetujuai oleh ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir -------
---

(3) Pemberhentian, Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih ½ (satu per dua) dari jumlah anggota, ----------
(4) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam ART dan atau ketentuan khusus, ----------

Pasal 20

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan ,yang kewenangannya ada pada RA dan tidak dapat menunggu dilaksanakan RA biasa seperti diatur pada pasal 18 diatas, ----------
(2) RALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diadakan apabila: ----------

a. *Ada Permintaan Paling Sedikit 20% Dari Jumlah Anggota; dan atau*
b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau --
---
c. Dalam hak keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan RA, ----------
---
d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang,tidak memungkinkan diadakan RA biasa dan RA khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas. ----------

(3) RALB sah dan keputusan mengikat seluruh anggota,apabila: ----------

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ----------
---
b. Untuk maksud pada ayat (2,d) diatas,harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota *yang hadir.* ----------

(4) Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam ART, ----------

BUPATI

BAB VI
P E N G U R U S

Pasal 21

(1) Pengurus KOPERASI dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota,----------

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus, sebagai berikut:
   a. Mempunyai kemampuan tentang perkoperasi, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap KOPERASI, ----------
   b. Mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan, ----------
   c. Sudah menjadi anggota KOPERASI sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. ----------
   d. Antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga ----------
   e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam ART----------

(3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 2(dua)) tahun, ----------

(4) Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus ----------

(5) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya,apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi ---

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus,harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji di depan RA ----------

(7) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga ----------

Pasal 22

(1) Jumlah pengurus sedikitnya 3(tiga) orang dan paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang ----------

(2) Pengurus terdiri dari : ----------
   a. Seorang atau beberapa orang ketua, ----------
   b. Seorang sekretaris, ----------
   c. Seorang bendahara, ----------

(3) Susunan Pengurus KOPERASI diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha KOPERASI, ----------

(4) *Pengurus dapat mengangkat direksi atau manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk* mengelola usaha KOPERASI,----------

(5) Apabila koperasi belum mampu mengangkat, Direksi/Manajer, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai Direksi/ Manajer KOPERASI dan pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus ----------

(6) Pengaturan lebih lanjut tentang susunan,tugas pokok,wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga,----------

BUPATI

Pasal 23

Tugas dan kewajiban pegurus adalah: ----------

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha KOPERASI ----------
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama KOPERASI ----------
3. Mewakili koperasi----------didalam dan diluar pengadilan, ----------
4. Mengajukan rencana kerja,anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI ----------
   ---
5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya, ----------
6. Memutuskan penerimaan anggota baru,penolakan anggota serta pemberhentian anggota, -------
   ---
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan, ----------
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha KOPERASI ----------
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselihan, ----------
10. Menanggung kerugian KOPERASI ---------- sebagai akibat karena kelalaiannya,dengan ketentuan: ----------
    a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus,maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan ----------
       ---
    b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus,maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita KOPERASI, ----------
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas,wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota, ----------
12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh KOPERASI dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya KOPERASI ----------
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya,berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas KOPERASI dalam hal-hal sebagai berikut: ----------
    1) Meminjam atau meminjamkan uang atas dasar KOPERASI ----------,dengan jumlah tertentu,yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus KOPERASI ----------
    2) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi, ----------

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak: ----------

a. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota, ----------
b. Mengangkat dan memberhentikan dirreksi/ manajer dan karyawan KOPERASI, ----------
   ---

c. Membuka cabang/ perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, ----------
d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha KOPERASI, ----------
e. Meminta laporan dari Direksi/ Manejer secara berkala dan sewaktu-sewaktu diperlukan. ----------

Pasal 25

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti: ----------
   a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik KOPERASI ----------
   b. Tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaanya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota, ---
   c. *Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi KOPERASI* ---------- ---------- khususnya dan gerakan KOPERASI pada umumnya, ----------
   d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan ----------
(2) Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat pengurus dengan dihadiri wakil pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara: --------
   a. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut, ----------
   b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut ----------
(3) Pengangkatan penganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus di pertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya ----------

BAB VII
P E N G A W A S

Pasal 26

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota ----------
(2) Yang dapaat dipilih menjadi Pengawas adalah Anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut : ----------
   a. Mempunyai pengetahuan tentang Perkoperasian, Pengawasan dan Akutansi, jujur dan dedikasi terhadap Koperasi, ----------
   b. Memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan, ----------
   c. *Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya* ---------- (---------) *Tahun* ----------
(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun ----------
(4) Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang ----------
(5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas,harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji didepan RA ----------
(6) Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam ART, ----------

BUPATI

Pasal 27

(1) Dalam hal KOPERASI ---------- telah mampu Direksi/ Manajer yang sudah Professional, maka Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan ditentukan dengan keputusan RA, ----------

(2) Dalam hal KOPERASI ---------- (tidak mengangkat Pengawas tetap),maka ditentukan: ----------

a. Pengangkatan direksi/manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh RA, ----------

b. *Fungsi dan tugas pengawas merupakan,menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus* tidak ikut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha,keuangan yang dijalankan oleh KOPERASI ---------- (Otonom) ----------

(3) Audit Keuangan harus dilakukan oleh akuntan publik dan non keuangan oleh tenaga ahli dibidang tersebut atas permintaan pengurus

(4) Pengaturan selanjutnya diatur didalam ART ----------

Pasal 28

Hak dan Kewajiban Pengawas adalah: ----------

a. Melakukan Pengawasa terhadap Pelaksanaan kebijaksanaan dan Pengelolaan Koperasi, -------

b. Meneliti catatan dan Pembukuan yang ada pada Koperasi, ----------

c. Mendapat segala keterangan yang diperlukan, ----------

d. *Memberikan koreksi,saran,teguran dan peringatan kepada Pengurus,* ----------

e. Merahasiakan hasil Pengawasannya terhadap pihak ketiga, ----------

f. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas Pengawasan kepada Rapat Anggota

Pasal 29

Pengawasan berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota ----------
---

Pasal 30

(1) Pengawas dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi. ----------

(2) Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi, ----------

Pasal 31

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: ----------

a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan Keuangan dan nama baik Koperasi -------

b. Tidak menaati ketentuan UU perkoperasian beserta peraturan,ketentuan pelaksanaannya,AD, ART dengan keputusan RA, ----------

UPATI

(2) Dalam hal salah anggota salah seorang pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir,rapat pengawas dengan dihadiri wakil pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara: ----------

a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain, ----------
b. *Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut,* ----------
c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam koperasi ---------- yang akibatnya merugikan Koperasi ---------- khususnya dan gerakan Koperasi umumnya, ----------
d. *Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan* ----------

(3) Pengangkatan Pengganti Pengawas sebagai mana tercantum pada ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada RA yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesehan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain ----------

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA

Pasal 32

(1) Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Direksi/Manajer dengan dibantu beberapa karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis ----------

(2) Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business unit yang dikelola secara Otonom dan Professional ----------

(3) Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota, ----------

(4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/ Manajer adalah: ----------

a. *Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha* Koperasi, atau magang dalam usaha KOPERASI----------
b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha, ----------
c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang Keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak Pidana dibidang Keuangan, ----------
d. Memiliki Akhlak dan Moral yang baik ----------
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga sesama Pengurus ----------
f. Belum pernah terbukti melakukan tindak Pidana apapun ----------

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/ Manajer bertanggung jawab kepada pengurus ---------

Pasal 33

Tugas dan kewajiban Direksi/Manajer adalah: ----------

a. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam Pengelolaan usaha KOPERASI, ----------
---
b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan, ----------
c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya, -----
---

UPATI

d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada KOPERASI yang berkaitan dengan pekerjaannya, ----------
e. Menanggung kerugiaan usaha KOPERASI sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang di sengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan ----------

Pasal 34

Hak dan wewenang Direksi/Manajer: ----------

a. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh pengurus dan Direksi/ Manajer, ----------
b. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, ------ ----------
c. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya, ----------
d. Bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha ----------

Pasal 35

(1) Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau standar operasional prosedur yang disahkan oleh RA, ----------
(2) Ketentuan lebih lanjut mngenai susunan tugas,kewajiban,hak dan wewenang Direksi/ Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam ART, ketentuan khusus dan kontrak kerja ---------- ----------

BAB IX
P E N A S E H A T

Pasal 36

(1) Apabila diperlukan, pengurus dapat mengangkat penasehat atas persetujuan RA ---------- ----------
(2) Penasehat memberi saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha KOPERASI, baik diminta maupun tidak diminta ----------
(3) Penasehat berhak menerima penghasilan/ imbalan/ jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota ----------

BUPATI

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 37

(1) Tahun buku KOPERASI adalah tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup, ----------

(2) KOPERASI ---------- Wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan *sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntasi* Koperasi khususnya serta standar akuntansi Indonesia pada umumnya, ----------

(3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setengah pembukuan Koperasi di tutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditanda tangani oleh semua anggota pengurus untuk disampaikan kepada RA yang disertai hasil audit Pengawas, ----------

(4) Apabila diperlukan, laporan tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan RA, atau Koperasi ---------- Tidak mengangkat Pengawas tetap maka laporan tahunan pengurus harus diaudit oleh AP sebelum di ajukan ke RA dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan LPJP ----------

(5) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan LPJP dan pelaksanaan audit *di atur dalam ART dan Peraturan khususnya* ----------

BAB XI
MODAL KOPERASI

Pasal 38

(1) Modal Koperasi ---------- terdiri dari : ----------
   a. Modal sendiri/ Ekuitas ----------
   b. Modal luar/ pinjaman ----------

(2) Modal dasar yang disetorkan pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp ---------- (----------) yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan dari para pendiri, ----------

(3) *Modal sendiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib Dana Cadangan dan bantuan berbentuk* sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat, ----------

(4) Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari : ----------
   a. Anggota , ----------
   b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya, ----------
   c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, ----------
   d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, ----------
   e. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri. ----------

(5) Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan ----------

Pasal 39

(1) Setiap anggota harus membayar Simpanan Pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota, ----------

(2) Setiap anggota diwajibkan untuk mambayar Simpanan Wajib Modal penyertaan yang diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota, ----------

(3) Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal penyertaan yang disetor kedalam modal dasar Koperasi ---------- *Tidak dapat diambil selama seseorang masih* menjadi anggota ----------

Pasal 40

(1) Untuk meningkatkkan pendapatan Koperasi ---------- Dapat menginvestasikan modal pada Koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham Obligasi, Penyertaan dan harus mendapat Persetujuan RA, ----------

(2) Ketentuan dan pengaturan selanjutnya di tetapkan dalam ART peraturan tersendiri, ----------

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal 41

(1) Sisa hasil usaha merupakan pendapatan KOPERASI yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan

(2) Sisa hasil usaha yang diperoleh dibagikan untuk: ----------
   a. Cadangan, ----------
   b. Anggota sesuai transaksi dan simpanannya, ----------
   c. Pendidikan, ----------
   d. Insentif untuk pengurus, ----------
   e. *Insentif untuk Direksi/Menejer dan karyawan* ----------

(3) Pembagian sisa hasil usaha dan pendapatan KOPERASI terdiri dari atas 3 (tiga) bagian: --------
   a. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi; dan
   b. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota ---------
   c. Pendapatan yang diperoleh dari non Operasional ----------

(4) Bagian dari sisa hasil usaha Koperasi yang diperoleh dari anggota diperlukan sebagai berikut:
   a. Untuk Cadangan -------- ---------- ----------
   b. Untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasai untuk memperoleh pendapatan perusahaan ---------- ----------
   c. Untuk anggota menurut perbandingan simpananya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-bank pemerintah ---------- ----------
   d. Untuk dana Pengurus dan Pengawas ---------- ----------
   e. Untuk kesejahteraan pengelola usaha dan Karyawan KOPERASI ---------- --
   f. Untuk dana pendidikan Koperasi ---------- ----------
   g. Untuk dana Sosial ----------

BUPATI

(5) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut: ----------

a. Untuk cadangan : 20 %
b. Untuk anggota : 25 %
c. Untuk Jasa Penyimpan : 20 %
d. Untuk dana pengurus dan pengawas : 15 %
e. Untuk dana pengelola dan karyawan : 5 %
f. Untuk dana pendidikan Koperasi : 5 %
g. Untuk dana Sosial : 5 %
h. Untuk dana Pemerintah Daerah : 5 %

(6) Bagian dari pendapatan Koperasi yang diperoleh dari pendapatan non operasianal dipergunakan sebagai berikut: ----------

a. Untuk cadangan ----------
b. Untuk anggota menurut perbandingan simpanannya ----------
c. Untuk dana pendidikan Koperasi ----------
d. Untuk dana Sosial ----------

(7) Pengunaan dana-dana Pendidikan dan dana sosial diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan ----------

(8) Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan ayat (6) ditentukan dalam anggaran rumah tangga dan diputuskan oleh Rapat Anggota ----------

Pasal 42

Bagian Sisa hasil usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dlam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ------

Pasal 43

(1) Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, ----------

(2) Bagian dari Cadangan KOPERASI dapat dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Khusus anggota ----------

(3) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi ½ (satu per dua) bagian atau 50 % dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi ---------

(4) Sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) bagian atau 50 % dari uang cadangan harus disimpan dalam bentuk giro pada Bank yang ditunjuk oleh pengurus ----------

(5) Anggota KOPERASI yang berhenti dari keanggotaan Koperasi secara sah dapat memperoleh bagian atas cadangan KOPERASI berdasarkan prosentase jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya pada KOPERASI, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga ----------

BUPATI

BAB XIII
P E M B U B A R A N

Pasal 44

(1) Pembubaran KOPERASI dapat dilaksanakan berdasarkan: ----------
   a. Keputusan rapat anggota, ----------
   b. Keputusan pemerintah ----------
(2) Pembubaran oleh rapat anggota didasarkan pada: ----------
   a. *Jangka waktu berdirinya KOPERASI telah berakhir,* ----------
   b. Atas permintaan sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota, ----------
   c. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha ----------

Pasal 45

(1) Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk tim penyelesai yang terdiri dari unsure anggota,pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud ----------
(2) Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban: ----------
   a. Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPERASI dalam penyelesaian, ----------
   b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan, ----------
   c. *Memanggil pengurus,anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-*sendiri maupun bersama-sama, ----------
   d. Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi, ----------
   e. Menggunakan sisa kekayaan KOPERASI untuk menyelesaikan kewajiban KOPERASI baik *kepada anggota maupun pihak ketiga* ----------
   f. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota ----------
(3) Pengurus KOPERASI menyampaikan keputusan pembubaran KOPERASI oleh Rapat Anggota tersebut kepada pejabat KOPERASI sesuai dengan ketentuan yang berlaku ----------
(4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya ----------

Pasal 46

(1) Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang ditimbulkan pada saat pembubaran Koperasi, ----------
(2) Tanggungan Anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan -
(3) Anggota yang telah keluar sebelum koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila *kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota* KOPERASI dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan ----------

BUPATI

BAB XIV
S A N K S I

Pasal 47

(1) Apabila anggota,pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenankan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: ----------

a. Peringatan lisan, ----------
b. Peringtan tertulis, ----------
c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya, ----------
d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri, ----------
e. Diajukan ke pengadilan, ----------

(2) Ketentuan mengenai sanksi di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ----------
---

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 48

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas ----------
---

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 49

Rapat *anggota menetapkan anggaran rumah tangga dan atau peraturan khusus, yang memuat* peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. ----------

Pasal 50

Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Koperasi NATAI PALINGKAU yang dilaksanakan di Desa Tangga Batu , tanggal 05 Februari 2007. ----------
---

1. ROBENSON. K	(Ketua)	.....
2. SILPANUS EMBANG	(Sekretaris)	.....
3. IROK KESEK RINGKIN	(Bendahara)	.....

METERAI TEMPEL

BUPATI